
**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLIDAERAH DI
TAKALAR**

Oleh :

A. Nurfahmi Auliah

Email:anurfahmiauliah@gmail.com

Pembimbing I :

Muhtar Sapiri

Email:muhtar.sapiri@yahoo.id

Pembimbing II :

Muh. Idris

Email:Idris@universitasbosowa.ac.id

**Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi Universitas
Bosowa**

ABSTRACT

A. Nurfahmi Auliah. 2018. Skripsi. The Effect of Motor Vehicle Tax and Cost of Vehicle to the Regional Income of the Takalar guided by Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M. Kes and H. Muh. Idris, SE., M.Si.

The purpose of this study is to determine effect of Motor Vehicle Tax, Cost Of Vehicle on Regional Income in Takalar. The data used are secondary data that uses time series from 2014 to 2017, using library research and documentation method done at UPT Revenue Takalar Region Bapenda South Sulawesi Province. Data analysis used in this research is multiple linear regression analysis.

The results of this study based on statistical calculations with SPSS 21 shows that Motor Vehicle Tax effect on regional income in Takalar with significant value of $0,019 < 0,05$ and value t count $33,219 > t$ table $12,7$, cost of vehicle no effect on regional income in Takalar with significant value of $0,109 > 0,05$ and value t count $5,796 < t$ table $12,7$ because most vehicle owners who have used sale and purchase transactions of used vehicles don't change the transfer fee, and simultaneously the Motor Vehicle Tax and the cost of vehicle effect on regional income in Takalar with significant value of $0,026 < 0,05$ and value F count $749,297 > F$ table $19,0$.

Keywords: Motor vehicle tax and cost of vehicle, Regional Income



PENDAHULUAN

Salah satu fungsi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut.

Indonesia sebagai Negara berkembang terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor, baik yang berupa fisik maupun mental. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional.

Takalar merupakan salah satu daerah otonomi. Pemberian otonomi terhadap daerah dimaksud agar daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk digunakan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2001:110).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat.

Berikut data yang diperoleh dari UPT Pendapatan Wilayah Takalar



Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan PKB dan BBN-KB di Takalar Tahun 2014-2017

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2014	Rp 13.788.294.152	Rp 19.992.967.125
2015	Rp 15.870.360.970	Rp 19.560.332.000
2016	Rp 18.198.767.320	Rp 21.109.563.000
2017	Rp 20.023.233.294	Rp 20.038.889.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Takalar diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB, tetapi kenyataannya hasil didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, adanya kendaraan bermotor selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapenda sebagai potensi pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hokum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin Internasional Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam), definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajibl membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 14 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam arti bea balik nama kendaraan tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari berikut ini:



1. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain.
2. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

ANALISIS DATA

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa bukti target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode 2014-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di UPT Pendapatan Wilayah Takalar Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 251 Takalar. Data penelitian yang digunakan adalah data berupa bukti target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode 2014 sampai dengan periode 2017.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di Takalar

Tahun	Target Pajak Kendaraan		Realisasi Pajak Kendaraan		(%)
	Bermotor		Bermotor		
2014	Rp	14.311.859.000	Rp	13.788.294.152	96,34
2015	Rp	14.600.530.000	Rp	15.870.360.970	108,69
2016	Rp	17.788.940.000	Rp	18.198.767.320	102,30
2017	Rp	19.896.400.000	Rp	20.023.233.294	100,63
Rata-Rata					101,99

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor selama tahun 2014-2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Takalar

Tahun	Target BBNKB		Realisasi BBNKB		(%)
2014	Rp	21.099.750.000	Rp	19.992.967.125	94,75
2015	Rp	20.595.500.000	Rp	19.560.332.000	94,97
2016	Rp	21.077.500.000	Rp	21.109.563.000	100,15
2017	Rp	20.651.000.000	Rp	20.038.889.000	97,03
Rata-Rata					96,72

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui perkembangan pemungutan penerimaan pendapatan asli daerah di takalar selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dapat dilihat di tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Takalar

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	(%)
2014 Rp	35.815.759.000	Rp 34.322.383.927	95,83
2015 Rp	35.762.030.000	Rp 36.213.346.547	101,26
2016 Rp	39.677.897.500	Rp 39.974.616.011	100,74
2017 Rp	41.481.658.408	Rp 41.054.208.113	98,96
Rata-Rata			99,20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Takalar Provinsi Sul-Sel, 2018 (diolah kembali)

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi secara normal atau tidak.

Berdasarkan uji normalitas pada tampilan grafik dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas yang dimana data atau titik menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini berarti nilai residual terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,412	,118		3,506	,177
PKB	,000	,001	-,042	-,144	,909
BBNKB	-,017	,005	-,947	-3,263	,189

a. Dependent Variable: AbsUt

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini uji autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Run Test. Data dikatakan terdapat gejala autokorelasi jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak

terdapat gejala autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandar dized Residual
Test Value ^a	,00034
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	,000
Asymp. Sig. (2- tailed)	1,000

a. Median

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* sebesar 1,000 > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Sehingga regresi linear dapat dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Kendaraan Bermotor	,856	1,168
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	,856	1,168

a. Dependent Variable: PAD

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa berdasarkan nilai tolerance pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan

bermotoryang diperoleh sebesar 0,856 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor diperoleh sebesar 1,168 lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Regresi Linear Berganda

regresi linear berganda digunakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan SPSS, maka hasil regresi disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,151	1,620	,945	1,302	
PKB	,478	,014	,927	33,219	,019
BBNKB	,420	,072	,162	5,796	,019

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.7 diatas dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = 3,151 + 0,478 PKB + 0,420 BBNKB + error
Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Konstanta (PAD) memiliki nilai positif sebesar 3,151. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bernilai konstan atau nol, pendapatan asli daerah akan bernilai positif sebesar 3,151.

Nilai koefisien (X1) sebesar 0,478. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang artinya jika pajak kendaraan bermotor bertambah sebesar 1 satuan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,478.

Nilai koefisien (X2) sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang artinya jika bea balik nama kendaraan bermotor bertambah sebesar 1 satuan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,420.

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing- masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,019. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,019 < 0,05$ dan nilai thitung $33,219 > t_{tabel} 12,7$. Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh bea balik nama kendaraan

bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,109. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,109 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,796 < t_{tabel} 12,7$ dengan demikian H_2 ditolak. Hal ini berarti bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli kendaraan bekas tidak mengganti bea balik nama kendaraan bermotor.

Uji Simultan Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisisnya dari output SPSS yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8 Uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,021	2	,011	749,297	,0026
Residual	,000	100	,000		Prob
Total	,021	102			

Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan output hasil uji F pada tabel 4.8 diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar $0,026 < 0,05$ dan nilai F hitung $749,297 > F$ tabel $19,0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 9

Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	,999	,998	,00375

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Kendaraan

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R square sebesar $0,998$ hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar $99,8\%$ dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar $0,02\%$.

KESIMPULAN

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar dari tahun 2014-2017, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Takalar setiap tahunnya.



2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar pada tahun 2014- 2017. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan transaksi jual-beli motor bekas tidak mengganti bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar pada tahun 2014-2017 secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, dan Christina Yunita. 2015. *Pengaruh Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal. Palembang: STIE MPD.
- Diah Elvina. 2017. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Drs. Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Prof. Dr. H. Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, dan Anneke Wangkar. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (studi kasus pada samsat Airmadidi)*. Jurnal Berkala Efisiensi Vol 15 No. 03. Universitas Sam Ratulangi.
- Rakatitha, Putu Nadya Kardevi, dan Gayatri. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi Vo 21.2. Universitas Udayana.



Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang. Empatdua Media.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Website: www.hukumonline.com (Diakses: 10 Maret 2018)